

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI KOTA
PARIAMAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Universitas Andalas



Oleh:

RIDHA RAHMI ANUM

141011112

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS ELPIJI 3 KG DI KOTA PARIAMAN

**(Ridha Rahmi Anum, 1410111112, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 61 halaman, 2018)**

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman No. 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan, bahwa harga per tabung gas elpiji 3 kg adalah Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah). Tetapi fakta yang ditemukan adalah masih banyaknya agen/pangkalan gas elpiji 3 kg yang menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas elpiji 3 kg yang mana konsumen membutuhkan gas yang memang menjadi haknya mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pariaman, agen/pangkalan gas elpiji 3 kg dan konsumen pengguna tabung gas elpiji 3 kg. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penjualan gas elpiji 3 kg tidak efektif karena persitensi basis yang menjual gas elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman No. 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan adalah sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah). Selanjutnya upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi terhadap harga eceran gas elpiji di Kota Pariaman adalah perlunya kebutuhan sinergi dan hubungan kerjasama antara pemerintah kota dengan pangkalan, informasi pemasangan harga eceran di setiap pangkalan dan ketentuan sanksi ketat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Gas Elpiji, Harga Eceran